

# **LAPORAN TRIWULAN III KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANTIBUM DAN LINMAS**

TAHUN ANGGARAN 2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TAHUN 2024**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Kewaspadaan Dini pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Kewaspadaan Dini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 23 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Dini serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Deteksi Dini mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, deteksi dan cegah dini penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain di bidang kewaspadaan dini yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dalam mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

### b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

## 1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan khususnya di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah.

- b. Sasaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, yaitu :
- 1) Masyarakat, Pelaku Usaha dan Badan Usaha;
  - 2) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

#### 1.4 Anggaran

Pagu Anggaran Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 358.984.300,- (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau terjadi pengurangan sebesar 2,93 % (dua koma sembilan puluh tiga) persen sebagaimana daftar tabel berikut :

#### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi			
	1.05.	02.1.	02	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	358.984.300,-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dok

## **BAB II** **PELAKSANAAN**

### **2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Proses pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan III (Juli - September) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

- a. Melakukan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Aksi Unjuk Rasa dari elemen masyarakat, berdasarkan :
  - 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1133/SATPOL.PP-B tanggal 23 Agustus 2024, dilaksanakan pada hari Jum'at, 23 Agustus 2024 dalam rangka Deteksi Dini pada Aksi Aliansi BEM se-Kalimantan Barat bertempat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat terkait penolakan Pengesahan Revisi RUU Pilkada.

Jumlah masyarakat yang melakukan aksi tersebut sebanyak ± 1.500 (seribu lima ratus) orang.

#### **Hasil Kegiatan :**

Pada hari Jumat 23 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor DPRD Prov. Kalbar Jl. Jendral Ahmad Ayani Kec. Pontianak Tenggara Prov. Kalbar, telah dilaksanakan Aksi Unjuk Rasa oleh Gabungan Elemen Mahasiswa Kalbar Tolak Pengesahan Revisi UU Pilkada. Korlap Aksi Korwil BEM Seka Sdr. Rami, Korwil BEM SI Sdr. Agim dan Koopus FKBK Sdr. Raihan, yang diikuti ± 1.500 orang.

1. Adapun yang tergabung dalam Elemen Mahasiswa Kalbar:
  - a. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengembang Amanat Rakyat (SOLMADAPAR);
  - b. BEM Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar;
  - c. Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat (FKBK);
  - d. BEM Universitas Muhammadiyah (UMP) Pontianak;
  - e. BEM Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Pontianak;

- f. BEM Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalbar;
  - g. Front Mahasiswa Nasional (FMN).
  - h. BEM Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI)
  - i. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kalbar;
  - j. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar;
  - k. PMKRI ST. Thomas More Pontianak;
  - l. BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untan.
  - m. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pontianak;
  - n. BEM Fakultas Hukum Untan;
  - o. BEM Institut Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pontianak.
2. Alat peraga yang digunakan:
- a. Mobil Komando.
  - b. Speaker.
  - c. Megaphone.
  - d. Bendera Almamater.
  - e. Bendera Merah Putih.
  - f. Pamflet dengan tulisan :
    - Indonesia tidak bisa menjadi emas, jika dipimpin keluarga Jokowi;
    - Bangkit Melawan Demokrasi Dinasti;
    - Dewan Perusak Demokrasi.
    - Revisi UU Pilkada Sahkan UU Masyarakat Adat.
    - Konstitusi RIP Demokrasi.
    - Negaraku Penjaraku.
    - Turunkan Rezim Kawal Putuskan MK Jokowi.
    - Ambisi Demi Sang Buah Hati.
    - Orde Reformasi.
    - Jokowi Father Of The Year.
  - g. Spanduk dengan tulisan :
    - Kawal Putusan MK BEM Untan melawan.
    - Turunkan Rezim Kawal Putusan MK.
    - Hentikan segala bentuk Penghianatan Demokrasi.
    - Bangkit melawan Demokrasi.
    - Negaraku Penjara.

3. Rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pukul 14.00 WIB Massa Aksi Gabungan Elemen Mahasiswa Kalbar berkumpul di titik kumpul Sekretariat BEM Untan.
- b. Pukul 14.37 WIB Massa Aksi Gabungan Elemen Mahasiswa Kalbar Longmarch menuju Kantor DPRD Prov. Kalbar.
- c. Pukul 15.05 WIB Massa Aksi Gabungan Elemen Mahasiswa Kalbar tiba di Kantor DPRD Prov. Kalbar, selanjutnya melaksanakan Orasi secara bergantian.
- d. Pukul 15.30 WIB Massa Aksi Gabungan Elemen Mahasiswa Kalbar membakar Ban bekas di Halaman Kantor DPRD Prov. Kalbar.
- e. Pukul 15.50 WIB Massa Aksi Massa Aksi Gabungan Elemen Mahasiswa Kalbar diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Prov. Kalbar Ibu Angeline Fremalco, S.H., M.H., (Fraksi PDIP) dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Prov. Kalbar Bpk. Suib, S.E. (Fraksi Hanura). Adapun penyampaian Wakil Ketua Komisi II DPRD Prov. Kalbar Bpk. Suib, S.E., (Fraksi Hanura):
  - 1) Hari ini kita bersepakat bahwa Republik ini lebih baik ketika UUD dirancang dengan sebagai mungkin dan ditaati. MK adalah garda terdepan hukum tatanegara, maka jika ada yang berani merubah keputusan MK kita wajib mengawal.
  - 2) Saya sepakat ketika ada yang membangkang terhadap keputusan MK maka kita wajib untuk ikut menyampaikan aspirasi karena tidak sesuai dengan Pancasila.
  - 3) Saya akan menyurati DPR RI terhadap penolakan RUU Pilkada yang di putuskan MK. Saya berdiri disini adalah bentuk komitmen saya terhadap mahasiswa, kita kawal bersama-sama jangan sampai terjadi RUU Pilkada terjadi.
- f. Pukul 16.24 WIB Perwakilan 10 orang Massa Aksi Gabungan Elemen Mahasiswa Kalbar melaksanakan audiensi dengan Anggota DPRD Prov. Kalbar, diruang Rapat Meranti Kantor DPRD Prov. Kalbar. Adapun penyampaian sebagai berikut :

1) Penyampaian perwakilan HMI:

- Menolak keras terkait batas usia calon kepala daerah yang ditetapkan oleh MK.
- Agar pihak DPRD Kalbar membuat pernyataan menolak atas revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh pihak DPR RI.

2) Penyampaian perwakilan IMM:

- IMM menolak keras disahkan revisi penetapan batas umur bagi calon kepala daerah sebagai yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- Mengancam tindakan DPR RI yang mengandung hasil keputusan MK atas penetapan batas umur pencalonan kepala daerah.
- Apabila tuntutan ini tidak diindahkan maka kami sebagai ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia Kalimantan Barat akan terus mengawal gugatan ini.
- Kami memberikan rentang waktu dua kali 24 jam kami dari IMM memberi waktu untuk DPRD Kalimantan Barat untuk membuat statement terhadap poin pertama.
- Hentikan tindakan represif aparat.

3) Penyampaian Aliansi BEM SI:

- Bagaimana sikap dari DPRD Kalbar terkait permasalahan ini.
- Kami ingin mengetahui bagaimana sikap DPRD Kalbar menyikapi revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh pihak DPR RI.

4) Penyampaian perwakilan BEM Untan:

- Mengawal putusan Mahkamah Konstitusi.
- Menolak revisi undang-undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI .
- Mendesak DPR RI untuk mengesahkan undang-undang masyarakat adat.

- 5) Tanggapan Ketua Komisi III DPRD Prov. Kalbar Bpk. Suib, S.E (Fraksi Hanura):
- Terkait dengan putusan MK mayoritas kami yang ada di DPRD Kalbar mayoritas semua setuju.
  - Terkait dengan batas usia kami beranggapan itu semua kepentingan politik bukan kepentingan hukum.
  - Terkait adanya revisi UU Pilkada yang dilakukan DPR RI saya pribadi merasa kaget.
  - Kita harus menjaga dan mengawal bersama terkait revisi UU Pilkada karena walaupun DPR RI sudah membatalkan terkait revisi UU namun jangan sampai diam-diam mengesahkannya.
- 6) Tanggapan Ketua Komisi I DPRD Prov. Kalbar Ibu Angeline Fremalco, S.H., M.H., (Fraksi PDIP):
- Secara umum kami dari PDIP mendukung penuh atas keputusan MK dan kami mengapresiasi atas tindakan dari adik-adik mahasiswa yang ada di Kalbar dan seluruh Indonesia atas gerakan yang dilakukan dengan menghasilkan pihak DPR RI membatalkan revisi UU Pilkada.
  - Kami dari DPRD Kalbar tidak bisa membuat statemen karena membawa atas nama lembaga, kami hanya bisa statemen secara pribadi.

g. Kesimpulan dari audensi :

Dari pihak perwakilan BEM-SI dan aliansi mahasiswa keluar ruangan secara tiba-tiba karena merasa permintaan mereka agar pihak DPRD untuk membuat statemen penolakan revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR RI, namun dari perwakilan DPRD yang hadir dalam audensi tidak bisa melakukan karena tidak bisa buat statemen atas nama lembaga.

- h. Pukul 16.56 WIB Audiensi selesai.
- i. Pukul 17.15 WIB Massa Aksi Gabungan Elemen Mahasiswa Kalbar, membubarkan diri dengan tertib.

- j. Pukul 17.20 Wib Aksi Unjuk Rasa oleh Gabungan Elemen Mahasiswa Kalbar Tolak Pengesahan Revisi UU Pilkada selesai dalam keadaan aman dan lancar

Catatan :

- a. Pengamanan dari Polda Kalbar dan Polresta Pontianak ± 300 orang Dpp Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi S.I.K., M.H
- b. Dua Personil Babinsa Pontianak Selatan Dpp Sertu Teguh

- 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1195/SATPOL.PP-B tanggal 11 September 2024, dilaksanakan pada hari Rabu, 11 September 2024 dalam rangka Deteksi Dini pada Aksi Damai Aliansi Perlawan Darurat bertempat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat terkait penolakan Finalisasi Ranperda RTRW Prov. Kalimantan Barat oleh Aliansi Perlawan Darurat, sebagai Korlap Sdr. Joshierai O.P.G

Jumlah masyarakat yang melakukan aksi tersebut sebanyak ± 40 (empat puluh) orang.

### **Hasil Kegiatan**

1. Adapun yang tergabung dalam Aliansi Perlawan Darurat sebagai berikut:
  - a. Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kalbar;
  - b. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kalbar;
  - c. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kalbar;
  - d. Forum Mahasiswa Kab. Landak (Formalak);
  - e. Asrama Mahasiswa Kab. Landak (AMKL);
  - f. Ikatan Pemuda Dayak Kubu Raya (IPDKR);
  - g. Ikatan Mahasiswa Dayak Jawatan Sekadau (IMDJS);
  - h. Forum Mahasiswa Dayak Kab. Sekadau (FMDKS)
2. Alat peraga sebagai berikut :
  - a. Bendera Merah Putih;
  - b. Bendera Almamater;
  - c. Mobil Pickup (Komando);
  - d. Megaphone dan Soundsystem aktif;

- e. Pita hijau diikat dilengan;
  - f. Spanduk bertuliskan Aliansi Perlawan Darurat menolak finalisasi Panperda RTRW Provinsi Kalbar;
  - g. Pamflet bertuliskan :
    - September Hitam 10 tahun Munir;
    - Anggota Dewan merupakan panutan bukan Koruptoran sana sini demi gengsi belakang menurut nafsu pribadi malah merupakan tugas mereka pada saat masa kampanye #saatnya masyarakat melawan.
3. Rangkaian kegiatan sebagai berikut :
- a. Pukul 09.00 Wib massa Aliansi Perlawan Darurat mulai berkumpul dilapangan Sekretariat BEM Untan Jln. Moch Isa Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
  - b. Pukul 09.50 Wib massa Aliansi Perlawan Darurat bergerak menuju kantor DPRD Prov Kalbar Jln. Jenderal A Yani Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara dengan long march;
  - c. Pukul 10.15 Wib massa Aliansi Perlawan Darurat tiba dikantor DPRD Prov. Kalbar, dilanjutkan melaksanakan Orasi;
  - d. Pukul 10.50 Wib massa Aliansi Perlawan Darurat diterima diruang Banggar DPRD Prov Kalbar oleh Anggota DPRD Prov Kalbar sebagai berikut :
    - Komisi III DPRD Prov Kalbar, H. Rasmidi S.E., M.M (Fraksi Demokrat);
    - Komisi II DPRD Prov Kalbar, Niken Tia Tantina, S.Hut (Fraksi PDIP);
    - Koordinator Komisi I DPRD Prov Kalbar, Sy. Muhammad Amin (Fraksi Nasdem);
    - Komisi V DPRD Prov Kalbar, Dr. Lidya Natalia Sartono, S.Pd., M.Pd. (Fraksi PDIP);
    - Bpk. Drs. Yoseph Alexander, M.Si (Fraksi PDIP);
    - Wakil Ketua Komisi III DPRD Prov. Kalbar Bpk. Suib, S.E. (Fraksi Hanura);
    - Bpk. Tony Kurniadi, S.T., M.Si. (Fraksi Nasdem)

- e. Pernyataan Sikap massa Aliansi Perlawanan Darurat sebagai berikut
- Mendesak DPRD Prov. Kalimantan Barat menunda Pengesahan Ranperda RTRWP Kalimantan Barat karena kurangnya pelibatan para pihak (Masyarakat terdampak, masyarakat Adat, masyarakat Lokal, Lambaga terkait, Ormas dll) dalam proses penyusunan Ranperda;
  - Mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Eksekutif dan legislatif) segera membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat;
  - Kami menolak Kawasan budi daya permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) yang kemudian terjemahkan dalam Pasal 46 Ayat 1 dengan bunyi Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f seluas kurang lebih 129.779 (seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hectar tersebar di seluruh Kab/Kota;
  - Mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk meninjau kembali permukiman masyarakat dan wilayah Adat yang masuk dalam Perizinan dan Kawasan Hutan agar dikeluarkan (Inclape);
  - Mendesak DPRD provinsi Kalimantan Barat memperjelas Pasal 93 ayat (1) huruf i, j,k,l,m tentang hutan Adat yang akan ditetapkan menjadi cagar budaya;
  - Mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Barat memasukkan hutan Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Desa Nanga Pari Kec. Sepouk Kab. Sintang kurang lebih seluas 4.272 Hektar di dalam Pasal 37 huruf f;
  - Kami Menolak Pembangunan PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) di Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dan/atau di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

3. Penyampaian dari Anggota DPRD Prov Kalbar, intinya :
  - Bawa kami pada hari ini pukul 13.00 Wib rencana akan dilaksanakan Rapat Pansus terkait Ranperda RTRW Prov. Kalbar bersama eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah;
  - Kami diberi waktu pembahasan hanya 106 hari, Raperda RTRW harus selesai ini dimulai dari bulan Juni, setelah turun dari Kemendagri dan instansi terkait harus sempurna;
  - Kami didesak harus selesai dan putus selama 106 hari. Persub nya ternyata keluar pada 3 September 2024, waktu sangat mepet sekali;
  - ATR ketika menetapkan sendiri tentang Peraturan ini, maka otomatis yang ditetapkan mereka hanya Peraturan dari mereka saja;
  - Itulah yang ingin saya sampaikan, karena memang terkesan tertutup;
  - Raperda ini memang berlaku selama 20 tahun, tetapi akan ada rentang waktu selama 5 tahun apabila ada revisi dalam Perda tersebut;
  - Tidak perlu lagi ada diskusi, kita tidak perlu tanya jawab lagi. Karena kita sifatnya hanya menerima dan menampung aspirasi;
  - Insya Allah amanah kalian akan saya sampaikan dalam rapat Pansus Ranperda RTRW

5. Pukul 12.30 Wib perwakilan massa Aliansi Perlawan Darurat menyerah tuntutan kepada anggota DPRD Prov. Kalbar;

6. Pukul 12.35 Wib aksi damai selesai dalam keadaan aman dan lancar

b. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini terkait Rangkaian Kegiatan Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, berdasarkan :

- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1092/SATPOL.PP tanggal 15 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 terkait Kegiatan Simulasi Sispamkota Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1093/SATPOL.PP tanggal 15 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024 terkait Kegiatan Simulasi Sispamkota Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- 3) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1105/SATPOL.PP tanggal 16 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 terkait Kegiatan Simulasi Sispamkota Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Dalam kegiatan Simulasi Sispamkota Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- b. Jelang Pilkada Kalbar 2024 pada akhir bulan Agustus ini, Polda Kalbar bersama TNI dan Satpol PP Provinsi Kalbar laksanakan latihan simulasi Sispamkota (Sistem Pengamanan Kota) yang dilaksanakan di Alun-alun Kapuas Pontianak selama 3 hari;
- c. Latihan dipimpin langsung Dansat Brimob Polda Kalbar, Kombes Pol Irwan Jaya sebagai Dirlat Sispamkota di dampingi oleh Karo OPS Polda Kalbar, Kombes Pol Asep Saepudin;
- d. Membuka kegiatan latihan simulasi Sispamkota, Karo OPS Polda Kalbar Kombes Pol Asep Saepudin memberikan arahan kepada para personel yang terlibat agar melaksanakan kegiatan latihan ini dengan sungguh-sungguh karena akan disaksikan oleh Forkompimda Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024;
- e. Dalam tahapan Pilkada ini yang paling krusial adalah masa kampanye yang berlangsung selama 60 hari, untuk itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
- f. Satgas Polda pada hari pelaksanaanya nanti akan bergerak ke daerah-daerah yang dianggap rawan dan membutuhkan pengamanan tambahan. Latihan ini merupakan gambaran di dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

- 4) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1137/SATPOL.PP tanggal 26 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis, tanggal 27 – 29 Agustus 2024 terkait Kegiatan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat :

**Hasil Kegiatan :**

- a. Jadwal pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dimulai pada Tanggal 27 - 29 Agustus 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Tanggal 27 Agustus 2024 tidak ada pasangan calon yang mendaftar di KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Tanggal 28 Agustus 2024 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sutarmidji dan Didi Haryono mendaftar di KPU Provinsi Kalimantan Barat dan didukung oleh :
  - Partai Nasdem
  - Partai Golkar
  - Partai Gerindra
  - Partai Demokrat
  - Partai Amanat Nasional
  - Partai Keadilan Sejahtera
  - Partai Solidaritas Indonesia
  - Partai Indonesia Rayasebelum mendaftar di KPU Provinsi Kalimantan Barat, pasangan Sutarmidji-Didi Haryono melakukan deklarasi bertempat di Pontianak Convention Center dan dihadiri oleh seluruh partai pendukung dan simpatisan. Kegiatan Deklarasi berjalan dengan aman dan tertib.
- d. Tanggal 29 Agustus 2024 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur :
  - 1) Pasangan Calon Muda Mahendrawan - Jakius Sinyor mendaftar di KPU Prov. Kalbar didukung oleh :
    - Partai Kebangkitan Bangsa
    - Partai Bulan Bintang
    - Partai Kebangkitan Nasional

- Partai Gelora
  - Partai Ummat
  - Partai Buruh
- 2) Pasangan Calon Ria Norsan - Krisantus mendaftar di KPU Provinsi Kalbar didukung oleh :
- Partai Persatuan Pembangunan
  - Partai Hati Nurani Rakyat
  - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Sebelum pendaftaran pasangan calon Ria Norsan - Krisantus melakukan deklarasi bertempat di Cafe Kluwi Pontianak Pukul 13.00 WIB.
- Selama prosesi pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur dilaksanakan dalam keadaan aman dan tertib.
- 5) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1226/SATPOL.PP tanggal 20 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 terkait Kegiatan Persiapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Kegiatan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Qubu Resort;
- b. Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat diminta untuk menugaskan 10 orang anggota pada kegiatan dimaksud.

- 6) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1227/SATPOL.PP tanggal 20 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 terkait Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 pukul 13.00 WIB -selesai bertempat di Qubu Resort Jalan Arteri Supadio Nomor 16 Kubu Raya.
  - b. Kegiatan dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat dan hasil pengundian nomor urut sebagai berikut :
    - 1) Pasangan Calon Sutarmidji-Didi Haryono mendapatkan Nomor Urut 1;
    - 2) Pasangan Calon Ria Norsan-Krisantus mendapatkan Nomor Urut 2;
    - 3) Pasangan Calon Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor mendapatkan Nomor Urut 3;
  - c. Kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon dapat berjalan dengan lancar transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU dan selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat potensi gangguan terhadap Trantibum.
- 7) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1259/SATPOL.PP tanggal 27 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 terkait Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2024 – 2029, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada Peringatan Hari Nasional, berdasarkan :

- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1103/SATPOL.PP-B Tanggal 16 Agustus 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024 bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kegiatan Upacara Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia);
- 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1104/SATPOL.PP-B Tanggal 16 Agustus 2024 dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Agustus 2024 bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Puncak Pekan QRIS Nasional dan Upacara Besar Hari Pramuka ke-63 Tahun 2024);

**Hasil Kegiatan :**

- a. Kegiatan Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada kegiatan Peringatan Hari Nasional dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat beserta Forkompimda dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan Pendopo Gubernur Kalimantan Barat;
- b. Disamping itu pada upacara peringatan juga dihadiri oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya. Sampai dengan selesainya kegiatan Upacara Peringatan maupun rangkaian kegiatannya dapat dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar serta tidak ditemukan gangguan tratribum selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini terkait Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1083/SATPOL.PP-B Tanggal 13 Agustus 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024;

**Hasil Kegiatan :**

- 1) Penjabat TP- PKK Provinsi Kalimantan Barat Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., beserta jajaran, melakukan peninjauan langsung Operasi Pasar di Area Pasar Kemuning Pontianak Selatan dalam rangka Aksi Sosial Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia RI ke-79 Tahun 2024.
  - 2) Jadi kegiatan hari ini kita melaksanakan operasi pasar dalam rangka menyambut HUT RI KE-79, meskipun kegiatan ini sebelumnya sudah kita laksanakan aksi-aksi Sosial lain diantaranya melakukan operasi pasar dalam rangka pengendalian Inflasi yang mana sampai bulan ini sudah kita lakukan sebanyak 80 kali untuk Kabupaten/Kota se - Kalbar," kata Pj. Ketua TP- PKK Kalbar Windy Prihastari.
  - 3) Dirinya menyebutkan, secara khusus di Bulan kemerdekaan ini Pemprov Kalbar melalui dinas terkait akan melaksanakan operasi pasar di dua tempat yakni di pasar Flamboyan dan Pasar Kemuning Pontianak.
  - a) Kegiatan Acara Operasi Pasar Dalam Rangka Hut Kemerdekaan Ri Ke- 79 di Pasar Kemuning Kota Baru Tahun 2024 berjalan dengan lancar tidak ditemukan pontensi gangguan trantibum pada kegiatan tersebut.
- e. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum pada Kegiatan kedatangan Jema'ah Haji Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan :
- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/944/SATPOL.PP-B Tanggal 9 Juli 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Juli 2024 bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat bertempat di Hotel Orchardz Pontianak;
  - 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/945/SATPOL.PP-B Tanggal 9 Juli 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Juli 2024 bertempat di Hotel Orchardz Pontianak;

- 3) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/954/SATPOL.PP-B Tanggal 11 Juli 2024 dilaksanakan pada hari Jum'at, 12 Juli 2024 bertempat di Hotel Orchardz Pontianak;
- 4) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/955/SATPOL.PP-B Tanggal 11 Juli 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Juli di Hotel Orchardz Pontianak;
- 5) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/963/SATPOL.PP-B Tanggal 12 Juli 2024 dilaksanakan pada hari Minggu, 14 Juli di Hotel Orchardz Pontianak;
- 6) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/964/SATPOL.PP-B Tanggal 12 Juli 2024 dilaksanakan pada hari Senin, 15 Juli di Hotel Orchardz Pontianak;

**Hasil Kegiatan :**

- a. Anggota Tim Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan Panitia Haji Tahun 2024 dan Pihak Hotel terkait dengan keamanan dan ketertiban Calon Jemaah Haji pada saat berada di Hotel dan waktu kedatangan dari Bandara Supadio Pontianak;
- b. Hasil pantauan dilapangan selama masa kedatangan Calon Jemaah Haji Kalimantan Barat, para penjemput telah memadati di sekitar kawasan Hotel Orchardz Perdana untuk menjemput keluarganya masing-masing.
- c. Sejumlah panitia juga tampak sigap mengatur dan mempersiapkan kepulangan para jama'ah haji tersebut. Kepulangan jama'ah haji dari embarkasi Batam. Berdasarkan informasi di peroleh, bahwa jumlah kepulangan jama'ah haji mulai tanggal tahun ini 2024 sejumlah 2.615 orang yang terdiri dari seluruh kab/kota yang ada kalbar yang terbagi dalam 6 kloter.
- d. Selama pelaksanaan kegiatan Kedatangan Calon Jemaah Haji tersebut tidak ditemukan potensi gangguan trantibum di kota pontianak.

- f. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam rangka Deteksi Dini terkait Kegiatan Pimpinan bertempat di Kota Pontianak, berdasarkan :
- 1) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/903/SATPOL.PP-B tanggal 28 Juni 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, 1 Juli 2024 terkait Kegiatan Pelantikan dan Penyerahan SK Secara Simbolis Bagi PPPK Formasi Tahun 2023 bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat;
  - 2) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/909/SATPOL.PP-B tanggal 1 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Juli 2024 terkait Kegiatan Pengambilan SK dan Pembuatan Rekening Gaji Bank Kalbar Bagi PPPK Formasi Tahun 2023 bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat;
  - 3) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1049/SATPOL.PP-B tanggal 1 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 2 Agustus 2024 terkait Pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak Masa Jabatan 2024-2028 bertempat di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak;
  - 4) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1062/SATPOL.PP-B tanggal 6 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 7 - 8 Agustus 2024 terkait kegiatan Penyelenggaraan Undian Simpeda Tingkat Nasional Periode ke-1 Tahun XXXV 2024 dan Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia bertempat di Pendopo Gubernur dan Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat;
  - 5) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1076/SATPOL.PP-B tanggal 9 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu, 11 Agustus 2024 terkait Kegiatan Karnaval Budaya Khatulistiwa bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat;

- 6) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1114/SATPOL.PP-B tanggal 19 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 terkait Kegiatan Persiapan Penyambutan Pahlawan Olahraga Indonesia bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat;
- 7) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1120/SATPOL.PP-B tanggal 20 Agustus 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 terkait Kegiatan Penyambutan Pahlawan Olahraga Indonesia bertempat di Kota Pontianak;
- 8) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1197/SATPOL.PP-B tanggal 11 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 September 2024 terkait Kegiatan Donor Darah Sukarela Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Markas PMI Provinsi Kalimantan Barat;
- 9) Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Nomor 300.1/1247/SATPOL.PP-B tanggal 24 September 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 24 September 2024 terkait Kegiatan Pengukuhan Penjabat Sementara ( Pjs ) 5 ( lima ) Bupati Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sekadau dan Melawi.

**Hasil kegiatan :**

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan Deteksi Dini dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait kegiatan Pimpinan baik Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada saat pelaksanaan kegiatan Pimpinan.
- b. Sampai selesainya kegiatan Pimpinan tersebut tidak ditemukan adanya potensi terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

## 2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

### REALISASI KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
<b>Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum</b>	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input Output : Dana : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	358.984.300,-	318.134.851,-	88,78 %

Sumber data : Realisasi Fisik per tanggal 30 September 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 358.984.300,- (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan pada Triwulan III telah direalisasikan sebesar Rp. 318.134.851,- (tiga ratus delapan belas juta serratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) atau sebesar 88,78 % Hal ini menunjukkan tingkat realisasi anggaran sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (anggaran kas).

## BAB III

### HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2024**

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Input Output : Dana : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Laporan	3 Laporan	75 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi sebanyak 3 (tiga) laporan atau sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen)

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

### **3.2 Kendala dan Solusi**

- a. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi yaitu belum optimal koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk memperoleh data dan informasi peta potensi rawan konflik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.
- b. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan dengan instansi terkait terkait baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, *stakeholder* maupun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

## BAB IV PENUTUP

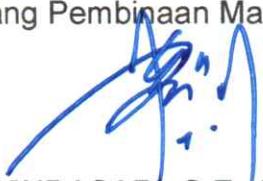
Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, Oktober 2024

Mengetahui:

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



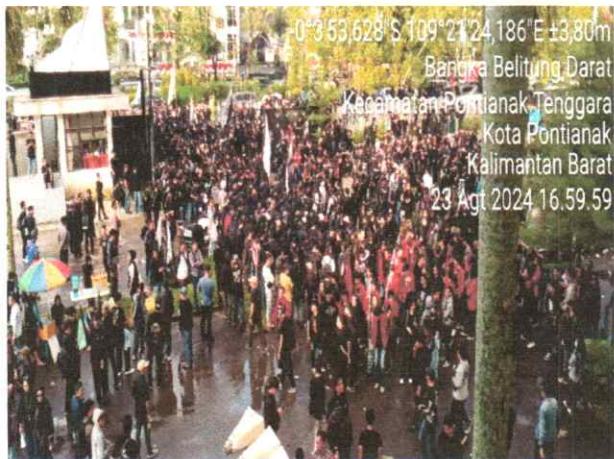
EKA WINDASARI, S.E., M.M.  
Pembina  
NIP. 19820814 200604 2 009

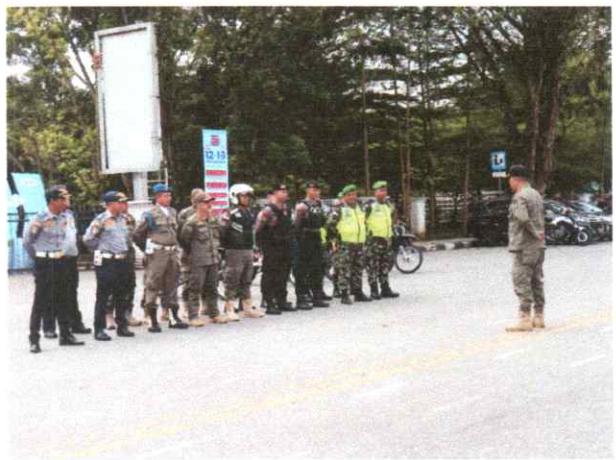
Plt. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini,



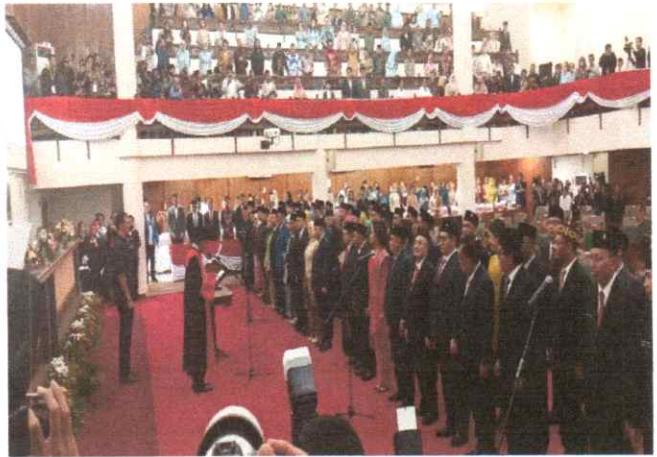
WAHYUDIN NUSA GUNAWAN  
Penata Tk. I  
NIP. 19740425 200701 1 013

## DOKUMENTApSI KEGIATAN











**KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GJAT	PERSONIL	LOKASI
1	No. 300.1/ 903 /SATPOL.PP-B Tanggal 28 Juni 2024	Senin, 1 Juli 2024	Koordinasi Penyelegaraan Ketenteraman, Keteribinan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pelantikan dan Penyerahan Surat Keputusan Secara Simbolis Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023	SATPOL PP	4 Orang Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat
2	No. 300.1/ 909 /SATPOL.PP-B Tanggal 1 Juli 2024	Selasa, 2 Juli 2024	Koordinasi Penyelegaraan Ketenteraman, Keteribinan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pengambilan Surat Keputusan dan Pembuatan Rekening Gaji Bank Kalbar Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023	SATPOL PP	4 Orang Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat
3	No. 300.1/ 927 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Juli 2024	Senin - Selasa, 8 - 9 Juli 2024	Koordinasi Penyelegaraan Ketenteraman, Keteribinan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	SATPOL PP	8 Orang Kabupaten Mempawah
4	No. 300.1/ 944 /SATPOL.PP-B Tanggal 9 Juli 2024	Rabu, 10 Juli 2024	Koordinasi Penyelegaraan Ketenteraman, Keteribinan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kepulangan Jema'ah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8 Orang Hotel Orchardz Jl. Perdana Pontianak
5	No. 300.1/ 945 /SATPOL.PP-B Tanggal 9 Juli 2024	Kamis, 11 Juli 2024	Koordinasi Penyelegaraan Ketenteraman, Keteribinan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kepulangan Jema'ah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	5 Orang Hotel Orchardz Jl. Perdana Pontianak
6	No. 300.1/ 954 /SATPOL.PP-B Tanggal 11 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024	Koordinasi Penyelegaraan Ketenteraman, Keteribinan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kepulangan Jema'ah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8 Orang Hotel Orchardz Jl. Perdana Pontianak

7	No. 300.1/ 955 /SATPOL.PP-B Tanggal 11 Juli 2024	Sabtu, 13 Juli 2024	Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kepulangan Jemaah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8	Orang	Hotel Orchardz Jl. Perdana Pontianak
8	No. 300.1/ 963 /SATPOL.PP-B Tanggal 12 Juli 2024	Minggu, 14 Juli 2024	Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kepulangan Jemaah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8	Orang	Hotel Orchardz Jl. Perdana Pontianak
9	No. 300.1/ 964 /SATPOL.PP-B Tanggal 12 Juli 2024	Senin, 15 Juli 2024	Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Kepulangan Jemaah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	8	Orang	Hotel Orchardz Jl. Perdana Pontianak
10	No. 300.1/ 1049 /SATPOL.PP-B Tanggal 1 Agustus 2024	Jumat, 2 Agustus 2024	Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Gubernur Kalimantan Barat ( Pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak Masa Jabatan 2024-2028 )	SATPOL PP	11	Orang	Gedung Aula Universitas Muhammadiyah pontianak
11	No. 300.1/ 1062 /SATPOL.PP-B Tanggal 6 Agustus 2024	Rabu - Kamis, 7 - 8 Agustus 2024	Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Penyelemparaan Undian Simpeda Tingkat Nasional Periode ke-1 Tahun XXXV 2024 dan Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia.	SATPOL PP	11	Orang	Pendopo Gubernur Kalimantan Barat
12	No. 300.1/ 1076 /SATPOL.PP-B Tanggal 9 Agustus 2024	Minggu, 11 Agustus 2024	Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Karnaval Budaya Khatulistiwa	SATPOL PP	11	Orang	Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat

13	No. 300.1/ 1083 /SATPOL.PP-B Tanggal 13 Agustus 2024	Selasa, 13 Agustus 2024	Koordinasi Penyele.nggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI ke-79 Tahun 2024	SATPOL PP 9	Orang Kota Pontianak
14	No. 300.1/ 1086 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024	Koordinasi Penyele.nggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gencar Keuangan Pramuka Dalam Ramgla Hari Pramuka dan Hari Indonesia MenabungKalimantan Barat.	SATPOL PP 8	Orang Pendopo Gubernur Kalimantan Barat
15	No. 300.1/ 1092 /SATPOL.PP-B Tanggal 15 Agustus 2024	Kamis, 15 Agustus 2024	Koordinasi Penyele.nggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Simulasi Sispamkota Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.	SATPOL PP 9	Orang Kota Pontianak
16	No. 300.1/ 1093 /SATPOL.PP-B Tanggal 15 Agustus 2024	Jumat, 16 Agustus 2024	Koordinasi Penyele.nggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Simulasi Sispamkota Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.	SATPOL PP 11	Orang Kota Pontianak
17	No. 300.1/ 1103 /SATPOL.PP-B Tanggal 16 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024	Koordinasi Penyele.nggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024.	SATPOL PP 10	Orang Kantor Gubernur Kalimantan Barat
18	No. 300.1/ 1104 /SATPOL.PP-B Tanggal 16 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024	Koordinasi Penyele.nggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Puncak Pekan QRIS Nasional dan Upacara Besar Hari Pramuka ke-63 Tahun 2024	SATPOL PP 10	Orang Kantor Gubernur Kalimantan Barat

19	No. 300.1/ 1105 /SATPOL.PP-B Tanggal 16 Agustus 2024	Senin,19 Agustus 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Simulasi Sispamkota Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.	SATPOL PP	11	Orang	Kota Pontianak
20	No. 300.1/ 1114 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 Agustus 2024	Selasa,20 Agustus 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Persiapan Penyambutan Pahlawan Olahraga Indonesia.	SATPOL PP	11	Orang	Pendopo Gubernur Kalimantan Barat
21	No. 300.1/ 1120 /SATPOL.PP-B Tanggal 20 Agustus 2024	Rabu,21 Agustus 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Penyambutan Pahlawan Olahraga Indonesia.	SATPOL PP	11	Orang	Kota Pontianak
22	No. 300.1/ 1126 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Agustus 2024	Kamis,22 Agustus 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Gerakan Pangan Murah.	SATPOL PP	11	Orang	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
23	No. 300.1/ 1133 /SATPOL.PP-B Tanggal 23 Agustus 2024	Jumat,23 Agustus 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Aksi Demo Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).	SATPOL PP	11	Orang	Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat
24	No. 300.1/ 1137 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 Agustus 2024	Selasa - Kamis .27 - 29 Agustus 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024	SATPOL PP	11	Orang	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
25	No. 300.1/ 1166 /SATPOL.PP-B Tanggal 2 September 2024	Senin, 2 September 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
26	No. 300.1/ 1174 /SATPOL.PP-B Tanggal 4 September 2024	Rabu, 4 September 2024	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteribuan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak

27	No. 300.1/ 1181 /SATPOL.PP-B Tanggal 6 September 2024	Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	5	Orang	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat
28	No. 300.1/ 1183 /SATPOL.PP-B Tanggal 6 September 2024	Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	10	Orang	Kota Pontianak
29	No. 300.1/ 1195 /SATPOL.PP-B Tanggal 11 September 2024	Rabu, 11 September 2024  Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Aliansi Perlawanan Darurat.	SATPOL PP	4	Orang	Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat
30	No. 300.1/ 1197 /SATPOL.PP-B Tanggal 11 September 2024	Kamis, 12 September 2024  Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Donor Darah Sukarela Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	4	Orang	Markas PMI Provinsi Kalimantan Barat
31	No. 300.1/ 1207 /SATPOL.PP-B Tanggal 17 September 2024	Selasa, 17 September 2024  Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak
32	No. 300.1/ 1216 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 September 2024	Rabu, 18 September 2024  Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
33	No. 300.1/ 1223 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 September 2024	Kamis, 19 September 2024  Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pj. Gubernur Kalimantan Barat.	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
34	No. 300.1/ 1226 /SATPOL.PP-B Tanggal 20 September 2024	Sabtu, 21 September 2024  Koordinasi Penyelemparaan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Persiapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024	SATPOL PP	6	Orang	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

35	No. 300.1/ 1227 /SATPOL.PP-B Tanggal 20 September 2024	Koordinasi Penyeleenggaran Ketereman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024	SATPOL PP	10	Orang	Qubu Resort Kubu Raya
36	No. 300.1/ 1247 /SATPOL.PP-B Tanggal 24 September 2024	Koordinasi Penyeleenggaran Ketereman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pengukuhan Penjabat Sementara ( Pjs ) 5 ( lima ) Bupati Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sekadau dan Melawi.	SATPOL PP	10	Orang	Kantor Gubernur Kalimantan Barat
37	No. 300.1/ 1259 /SATPOL.PP-B Tanggal 27 September 2024	Koordinasi Penyeleenggaran Ketereman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum Pada Kegiatan Pengucapan Sumpah/JANJI Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2024 - 2029.	SATPOL PP	10	Orang	DPRD Provinsi Kalimantan Barat